

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tren belanja pendidikan di Kabupaten Solok jika dilihat dari sisi belanja langsung dan tidak langsung periode 2011-2015 meningkat untuk setiap tahunnya. Tren belanja yang paling dominan adalah belanja tidak langsung. Hal ini tentu saja menyisakan ruang yang terbatas untuk belanja langsung. Sehingga fungsi anggaran sebagai alat penentu tujuan dan sasaran kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.
2. Berdasarkan peramalannya tren APBD dan belanja pendidikan di Kabupaten Solok tahun anggaran 2016-2020 meningkat. Untuk tahun 2020 belanja pendidikan mendapat porsi 41,7 persen dari APBD. Ini berarti pemerintah sedang gencar-gencarnya meningkatkan kualitas pendidikan terutama peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun.
3. Berdasarkan pembahasan penyerapan belanja pendidikan Kabupaten Solok, terserap dengan baik (lebih dari 90 persen). Kecuali untuk tahun 2013 dan 2015, hal ini disebabkan oleh kurangnya serapan belanja pada belanja pegawai dan belanja peralatan dan mesin.

4. Dilihat dari besarnya porsi belanja pendidikan terhadap total APBD Kabupaten Solok, masih jauh dibawah 20 persen diluar gaji serta biaya kedinasan, yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Tetapi jika porsi tersebut disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan gaji pegawai termasuk 20 persen anggaran pendidikan, maka hasilnya hanya tahun anggaran 2014 dan 2015 saja yang memenuhi amanat tersebut. Sedangkan tahun 2011-2013 masih dibawah 20 persen anggaran. Hal ini terjadi karena tenaga pendidik yang mendapat sertifikasi meningkat tajam pada tahun 2014 dan 2015, baik dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
5. Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Operasional hasilnya tahun 2011 dukungan belanja operasional sangat tinggi untuk fasilitas pendidikan. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan. Apalagi tahun 2014 hanya 4,78 persen dan tahun 2015 sebesar 7,79 persen saja dukungan belanja operasional untuk penunjang fasilitas pendidikan. Hal ini tentu sangat jauh dari yang diharapkan.
6. Angka Partisipasi Sekolah pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan SMA. Hal ini disebabkan karena jenjang pendidikan SD dan SMP merupakan pendidikan dasar formal pertama yang harus dilalui oleh anak usia sekolah.
7. Angka Putus Sekolah pada tingkat pendidikan SD dan SMP mengalami penurunan, tetapi tingkat SMA justru terjadi peningkatan. Angka putus

sekolah yang paling tinggi adalah tingkat SMA/MA. Angka Putus Sekolah disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor ekonomi.

8. Belanja pendidikan mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Demikian juga dengan angka partisipasi sekolah juga meningkat untuk setiap tahunnya. Sedangkan angka putus sekolah juga mengalami penurunan, kecuali tingkat pendidikan SMA. Berarti hal ini telah sesuai dengan teori jika belanja pendidikan meningkat, maka angka partisipasi sekolah meningkat dan angka putus sekolah menurun.

5.2 KELEMAHAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut :

1. Indikator dalam kinerja bidang pendidikan yang digunakan masih sangat terbatas yang memungkinkan terjadinya bias karena tidak memperhatikan indikator lain yang sesungguhnya.
2. Tidak lebih spesifik dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah, karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi seperti kondisi sosial lingkungan, minat anak untuk sekolah dan perhatian orang tua.
3. Dalam menganalisa belanja pendidikan dengan kinerja bidang pendidikan, peneliti hanya menghubungkan dan tidak menguji pengaruh serta tidak mengevaluasi hasil kinerja masing-masing program.

4. Penelitian ini masih tergolong baru di Kabupaten Solok sehingga diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya untuk lebih memperkuat hasil dan simpulan yang diambil.

5.3 SARAN

Setelah memberikan beberapa simpulan, maka ada beberapa saran kepada Pemerintah selaku pembuat kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Besarnya belanja pendidikan di Kabupaten Solok untuk belanja tidak langsung yaitu untuk gaji dan tunjangan pegawai. Belanja tidak langsung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari kesimpulan di atas maka disarankan agar melakukan pengkajian secara mendetail ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pemetaan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sesuatu yang mendesak sehingga diketahui secara pasti berapa besar kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Solok. Selanjutnya dilakukan penataan ulang pendidik dan tenaga kependidikan agar pengelolaan belanja pendidikan bisa berjalan secara efisien dan efektif.
2. Dengan adanya penurunan penyerapan untuk setiap tahunnya, terutama tahun 2013 dan 2015. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, untuk lebih efisien dan efektif dalam penyusunan anggaran. Sehingga dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

3. Anggaran belanja pendidikan untuk lebih ditingkatkan lagi di tahun mendatang, karena baru tahun 2014 dan 2015 saja yang memenuhi amanat Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008.
4. Alokasi Belanja pendidikan untuk belanja langsung lebih ditingkatkan lagi karena rendahnya belanja modal, belanja barang dan jasa akan menyulitkan guru untuk mengadakan media dan alat peraga pendidikan, sehingga pembelajaran akan berjalan secara monoton.
5. Mereformulasi komposisi alokasi belanja pendidikan jenjang SMA/MA karena angka partisipasi sekolah masih jauh dibawah standar pelayanan minimum, dengan perlunya menambah alokasi biaya pendidikan yang terkait dengan penurunan beban biaya pendidikan yang mesti ditanggung oleh siswa seperti beasiswa dan insentif lain yang terkait kemudahan dalam mengakses pendidikan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu meningkatkan anggaran belanja pendidikan, sehingga berdampak pada pencapaian angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

